PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAPPERIDA

HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bakti untuk Bangsa

HRP
HAFECS
Research & Publication

POLICY BRIEF

Tahun 2026

Mewujudkan Asta Cita melalui Penguatan Desain Kebijakan Inovasi Daerah dan Ekosistem Kewirausahaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan *(Akselerasi Akses Pembiayaan, Keterukuran Dampak, dan Replikasi Ekonomi Desa)*

Penyusun:
Dr. Muhammad Rahmattullah, M.Pd ; Rizky Febriyani Putri, M.Pd ; Ratna Yulinda, M.Pd; Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc; Farida Hayati, S.Pd ; Raihani Raziqin, S.Tr.Kom; M. Fadli Ridhani, S.Kom., M.Kom

Policy Brief
No: 001/HAFECS-HRP/PB/VIII/2026

Mewujudkan Asta Cita melalui Penguatan Desain Kebijakan Inovasi Daerah dan Ekosistem Kewirausahaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan *(Akselerasi Akses Pembiayaan, Keterukuran Dampak, dan Replikasi Ekonomi Desa)*

Ringkasan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah menginisiasi dan mengimplementasikan sejumlah inovasi daerah yang berorientasi pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, hasil evaluasi desain kebijakan terbaru mengindikasikan adanya kesenjangan struktural yang signifikan, khususnya pada domain akses pembiayaan dan sistem pemantauan dampak program. Kekuatan program saat ini masih terpusat pada aspek pendampingan teknis, sementara akses permodalan dan pengukuran outcome ekonomi masih sangat lemah. Untuk mengawal pencapaian Asta Cita 3 (Kewirausahaan), 5 (Hilirisasi), dan 6 (Pemerataan Ekonomi Desa), dokumen ini merekomendasikan tiga langkah strategis: (1) penciptaan skema pembiayaan afirmatif berbasis data kinerja usaha, (2) pembangunan dashboard pemantauan tunggal (SIMONEV) berbasis indikator hasil (outcome), dan (3) penerbitan payung regulasi untuk replikasi model pemberdayaan ekonomi berbasis desa/kelurahan.

Latar Belakang dan Permasalahan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah menginisiasi dan mengimplementasikan sejumlah inovasi daerah yang berorientasi pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, hasil evaluasi desain kebijakan terbaru mengindikasikan adanya kesenjangan struktural yang signifikan, khususnya pada domain akses pembiayaan dan sistem pemantauan dampak program. Kekuatan program saat ini masih terpusat pada aspek pendampingan teknis, sementara akses permodalan dan pengukuran outcome ekonomi masih sangat lemah. Untuk mengawal pencapaian Asta Cita 3 (Kewirausahaan), 5 (Hilirisasi), dan 6 (Pemerataan Ekonomi Desa), dokumen ini merekomendasikan tiga langkah strategis: (1) penciptaan skema pembiayaan afirmatif berbasis data kinerja usaha, (2) pembangunan dashboard pemantauan tunggal (SIMONEV) berbasis indikator hasil (outcome), dan (3) penerbitan payung regulasi untuk replikasi model pemberdayaan ekonomi berbasis desa/kelurahan.

Data dan Temuan

Berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap 12 inovasi prioritas Kabupaten HSS, teridentifikasi tiga temuan utama sebagai berikut:

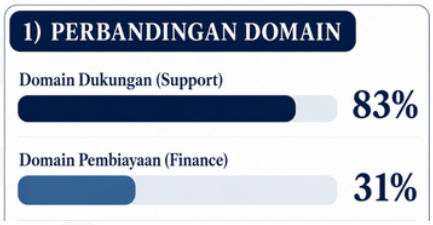

1. Ketimpangan Domain Ekosistem yang Kritis: Menggunakan kerangka analisis enam domain ekosistem kewirausahaan (Isenberg-Spigel), terungkap bahwa domain Dukungan (Support) mendominasi dengan akumulasi skor sebesar 83% (30 dari 36 poin). Sebaliknya, domain Pembiayaan (Finance) tercatat sangat rendah, yaitu hanya mencapai 31% (11 dari 36 poin). Hal ini membuktikan bahwa kebijakan inovasi yang ada lebih bersifat fasilitatif daripada produktif, sehingga daya ungkit terhadap pertumbuhan usaha sangat terbatas.

2. Rendahnya Kualitas Desain dan Keterukuran Dampak: Secara agregat, rata-rata skor evaluasi desain kebijakan 12 inovasi prioritas berada pada angka 3,19 dari skala 5, yang berkategori "Cukup". Dimensi keterukuran dampak menjadi faktor paling dominan yang menurunkan skor tersebut. Terdapat 7 dari 12 inovasi prioritas (meliputi MAU SOP IGA, SADATU, PETA DASEL, dan KUBAR) yang belum memiliki dokumentasi data kuantitatif atas capaian programnya. Kondisi ini menyebabkan proses perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPD) tidak dapat didasarkan pada bukti kinerja yang objektif.

3. Fondasi Praktik Baik yang Telah Terbukti: Di tengah kelemahan struktural tersebut, Inkubator Dopat telah membuktikan efektivitasnya dengan basis data kinerja yang sangat kuat. Inovasi ini mencatatkan 39 tenant binaan dengan omzet tahunan mencapai Rp5.086.562.759, keuntungan tahunan sebesar Rp2.406.831.750, serta mampu menyerap 75 tenaga kerja. Rasio keuntungan terhadap omzet tercatat sebesar 47,3%, yang mengindikasikan bahwa produk lokal HSS (dodol dan ketupat Kandangan) memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi apabila dikelola dengan desain kebijakan yang tepat.

Rekomendasi Strategis

Untuk mengatasi kesenjangan struktural tersebut dan menjadikan inovasi daerah sebagai penggerak utama Asta Cita 3, 5, dan 6, direkomendasikan tiga langkah strategis sebagai berikut.

4.1. Transformasi Data Kinerja Menjadi Instrumen Akses Pembiayaan

Pemerintah Daerah melalui Bapperida dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah direkomendasikan untuk membangun kemitraan formal dengan lembaga perbankan daerah (BRI dan Bank Kalsel). Data kinerja keuangan yang telah tervalidasi (sebagaimana yang dimiliki oleh Inkubator Dopat) dapat difungsikan sebagai alat penilaian kelayakan kredit (credit scoring). Dengan demikian, pelaku usaha yang sudah terbukti produktif tidak lagi terkendala agunan fisik, melainkan dapat mengakses KUR Afirmatif untuk ekspansi kapasitas produksi, pengadaan mesin, dan pemenuhan pesanan pasar.

4.2. Penyusunan Dashboard Pemantauan Kinerja Daerah (SIMONEV UMKM)

Bapperida direkomendasikan untuk segera mengembangkan sistem SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi) yang terintegrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dashboard tersebut tidak hanya memuat indikator keluaran (output), melainkan wajib menyajikan indikator hasil (outcome) yang terukur, antara lain: peningkatan rata-rata omzet usaha binaan, jumlah tenaga kerja yang terserap secara periodik, dan nilai transaksi riil yang dihasilkan melalui ruang pasar fisik serta digital. Instrumen ini akan menjadi dasar penyusunan RKPD yang berbasis bukti dan akuntabel.

4.3. Penerbitan Regulasi untuk Replikasi Ekonomi Desa

Inovasi tingkat lokal seperti GIAT UMKM GO ON (Kelurahan Kandangan Utara) dan PETA DASEL (Kecamatan Daha Selatan) telah menunjukkan manfaat nyata, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada inisiatif kepemimpinan setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai standar pendataan dan digitalisasi UMKM berbasis desa/kelurahan. Regulasi ini akan mewajibkan penggunaan standar data terintegrasi dengan SADATU dan mewajibkan replikasi model klinik UMKM ke seluruh kecamatan, guna memastikan pemerataan akses layanan ekonomi.

Tahapan Implementasi

Agar rekomendasi tersebut dapat diwujudkan secara sistematis, implementasi kebijakan direkomendasikan dilaksanakan dalam tiga tahapan.

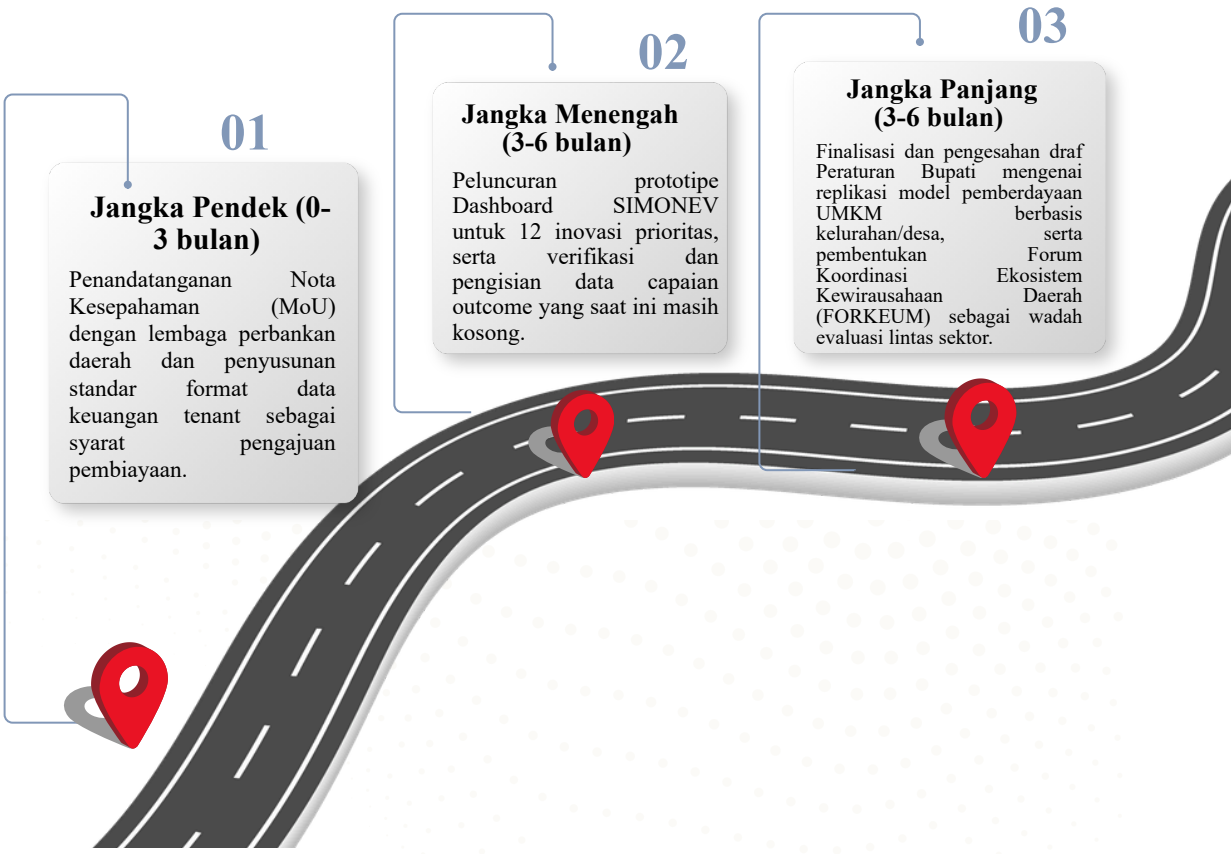

Penutup

Pencapaian Asta Cita 3, 5, dan 6 tidak dapat diwujudkan hanya dengan menambah jumlah program dan pelatihan. Dibutuhkan sebuah restrukturisasi desain kebijakan yang menghubungkan pendampingan teknis dengan akses permodalan, serta kegiatan operasional dengan pengukuran dampak. Pemerintah Kabupaten HSS tidak perlu menciptakan inovasi baru dalam jumlah besar, melainkan diharapkan untuk mengoptimalkan dan menghubungkan inovasi yang telah ada ke dalam satu ekosistem yang saling menopang. Langkah konkret pertama yang paling mendesak adalah menginstruksikan Bapperida dan Dinas Koperasi untuk segera menjajaki skema pembiayaan afirmatif dan menyusun dashboard data kinerja, agar inovasi daerah benar-benar bertransformasi menjadi pengungkit produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.